

Mahkamah Konstitusi Dimata Publik: Kajian Persepsi Mahasiswa Terhadap Lembaga Peradilan Tertinggi

Cinta Marcella Namira¹ Dame Lamtiur Simanjuntak² Indah Vanesa Br Ginting³ Nadyne Zarlyza⁴ Putri Najwa Sabrina NST⁵

Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: cintamarcella.4233121025@mhs.unimed.ac.id¹

Abstract

This research aims to examine students' perceptions of the Constitutional Court (MK) as the highest judicial institution in Indonesia. By using a qualitative approach through interviews via Gform and literature study, this research explores the views of students from various study programs. The research results show that the majority of students recognize the importance of the Constitutional Court's role in maintaining the constitution and democracy, although there are doubts regarding the independence and transparency of this institution. Factors that influence perceptions include access to information, mass media coverage, and political dynamics. This research recommends increasing transparency, independence and public communication by the Constitutional Court to strengthen public trust.

Keywords: Constitutional Court, Student Perceptions, Democracy, Independence, Transparency

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi mahasiswa terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara melalui Gform dan studi literatur, penelitian ini mengeksplorasi pandangan mahasiswa dari berbagai program studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa mengakui pentingnya peran MK dalam menjaga konstitusi dan demokrasi, meskipun terdapat keraguan terkait independensi dan transparansi lembaga ini. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi meliputi akses informasi, pemberitaan media massa, dan dinamika politik. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi, independensi, dan komunikasi publik oleh MK guna memperkuat kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Persepsi Mahasiswa, Demokrasi, Independensi, Transparansi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan norma pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. (Chakim, 2016). Dengan kedaulatan yang berada ditangan rakyat sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut lah yang menciptakan perubahan dalam sistem ketatanegaraan. Puncak dari hasil reformasi yang telah dilakukan adalah pembentukan lembaga tinggi negara, yaitu Mahkamah Konstitusi yang diakui sebagai hasil dari amandemen UUD 1945. Selanjutnya pada pasal 24 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. oleh karena itu, pasal 24 ayat (2) UUD 1945 mencerminkan pengakuan dan legitimasi terhadap keberadaan Mahkamah konstitusi. (Saputra et al., 2024) Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dimaksudkan untuk menjaga dan memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme. Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan otoritas untuk menafsirkan konstitusi merupakan upaya untuk

mendorong dan menciptakan sistem ketatanegaraan yang demokratis.¹⁴ Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan ditengah kehidupan masyarakat dan bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab, serta berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat. (Umar & Sofyan, 2023)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki peran penting sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan konstitusi, termasuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sesuai dengan Pasal 24C ayat (1). Kewenangan ini memberikan Mahkamah Konstitusi posisi strategis dalam menjaga supremasi hukum, melindungi hak-hak fundamental warga negara, dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi. Kontroversi seringkali mewarnai putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Kontroversi ini disebabkan oleh potensi konflik kepentingan yang muncul, terutama terkait keterlibatan anggota Mahkamah Konstitusi dalam kasus-kasus tertentu¹¹ Keterlibatan keluarga Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, bersama salah satu pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, menimbulkan pertanyaan akan independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi.

Dalam menanggapi isu-isu kontroversial, Mahkamah Konstitusi perlu menjaga transparansi dan kualitas pelayanannya, menerapkan self-restricted, memperbaiki sistem rekrutmen agar lebih terbuka, dan menetapkan syarat menjadi Hakim Konstitusi yang lebih rasional dan terukur. ¹³ Langkah-langkah ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dan memastikan bahwa putusan-putusannya dianggap adil dan netral oleh masyarakat. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat memainkan peranannya sebagai pengawas kepatuhan kebijakan publik terhadap konstitusi dengan lebih efektif. (Yuliana et al., 2024) Maka dari itu, peneliti tertarik menjadikan mahasiswa dari beberapa universitas sebagai subjek penelitian. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa mahasiswa, terlepas dari program studi mereka, memiliki kemampuan analisis dan wawasan yang mendalam, terutama dalam memahami isu-isu terkait Mahkamah Konstitusi. Pemilihan ini juga mempertimbangkan keberagaman pandangan mahasiswa yang diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian ini. Maka dari persoalan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian sederhana mengenai "Mahkamah Konstitusi dimata Publik: Kajian Persepsi Mahasiswa Terhadap Lembaga Peradilan Tinggi" penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji persepsi mahasiswa terhadap MK sebagai Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Persepsi publik sangat penting dalam menilai efektivitas dan legitimasi Lembaga peradilan. Jadi penelitian ini ingin memahami bagaimana mahasiswa memandang Mahkamah Konstitusi dan apa yang menjadi faktor yang memengaruhi persepsi tersebut serta bagaimana persepsi ini dapat memengaruhi kinerja Mahkamah Konstitusi.

Kajian Teoritis

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang berwenang memutus Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah (PHPU Kada). Sifat Putusan MK final dan mengikat sehingga semua pihak wajib menaati dan melaksanakannya. Namun dalam faktanya, terdapat Putusan MK yang tidak ditaati dan dilaksanakan. Artinya, ada dugaan pembangkangan terhadap Putusan MK. (Soeroso, 2013) Keberadaan peradilan tata negara (Mahkamah Konstitusi) di Indonesia

sesungguhnya tidak terlepas dari keinginan masyarakat agar pemerintahan diselenggarakan atas supremasi konstitusi dan prinsip-prinsip cita negara hukum. Di mana dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara, hal ini sesuai dengan slogan *the rule of law, not of man*, yang secara sederhana dapat dimaknai bahwa dalam negara hukum, sistem hukumlah yang sesungguhnya memerintah. Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pada esensinya berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), agar konstitusi dijadikan landasan dan dijalankan secara konsisten oleh setiap komponen negara dan masyarakat. Mahkamah Konstitusi berfungsi mengawal dan menjaga agar konstitusi ditaati dan dilaksanakan secara konsisten, serta mendorong dan mengarahkan proses demokratisasi berdasarkan konstitusi. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir tunggal atas Undang-Undang Dasar, yang direfleksikan melalui putusannya (*constitutional court*). Sejak Mahkamah Konstitusi didirikan pada tahun 2003 sampai saat ini, ratusan bahkan mungkin ribuan perkara yang telah ditangani, baik yang berkaitan dengan kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD dan perselisihan hasil pemilihan umum atau pun berkaitan dengan kewenangan lainnya. Termasuk perkara-perkara yang secara eksplisit bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi dalam praktiknya tetap diakomodir bahkan beberapa diantaranya dikabulkan, seperti pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dan sengketa lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur langsung dalam UUD.

Fungsi Konstitusi

Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan secara langsung melalui UUD NRI 1945, diantaranya berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi lembaga negara Indonesia yang mana menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dengan tanggung jawab. Visi Mahkamah Konstitusi, yaitu menegakkan konstitusi untuk mewujudkan cita-cita negara hukum dan negara demokrasi di Indonesia.(Putri, 2022)

Putusan Hasil Penafsiran Hakim Konstitusi

Terdapat beberapa putusan yang dipersepsikan sebagai putusan yang tumbuh dan lahir dari hasil penafsiran hakim konstitusi. Sebab jika ditelaah, beberapa perkara yang telah diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi bukan merupakan bagian dari kewenangannya, tetapi faktanya, mahkamah tetap menangani, mengadili dan memutus permohonan tersebut. Beberapa diantaranya akan dirinci sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 menjadi cikal bakal pengujian Perppu sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Padahal rumusan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 dengan tegas hanya menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD: “Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
2. Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012. Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012 juga dikategorikan sebagai putusan yang berkontribusi terhadap “pertumbuhan” kewenangan Mahkamah

Konstitusi dalam memutus perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Sebagaimana diketahui bahwa UUD NRI 1945 memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diatribusikan langsung oleh UUD, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 24C Ayat (1) ...memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

3. Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013. Putusan lain yang juga menambah daftar “pertumbuhan” kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah berkaitan dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013. Pada awalnya, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menangani sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden serta PHPU Pemilu Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD).

Ketiga contoh yang telah diuraikan memberi gambaran dinamika internal hakim Mahkamah Konstitusi yang diwarnai perbedaan-perbedaan pandangan (*concurring opinion* dan *dissenting opinion*) dalam menentukan dasar kewenangan untuk menangani suatu permohonan yang tidak secara eksplisit diatur sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD NRI 1945. Perbedaan pendapat hakim dalam memutus suatu perkara oleh Simon Butt, 18 dianggap dapat mendatangkan minimal 2 (dua) manfaat, yaitu (i) membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas peradilan; dan (ii) dapat membantu membentuk keputusan pengadilan di masa depan. Perdebatan-perdebatan konstruktif diinternal hakim Mahkamah Konstitusi diharapkan tetap dinamis, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan progresif.(Umar & Sofyan, 2023)

Hakikat, Tugas dan Kewengannya

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus dan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, Pasal 24C ayat (2) menambahkan pula bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Kewajiban ini secara timbal balik juga berisi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara yang telah dimaksud, sehingga dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki lima bidang kewenangan peradilan.(Masrufah & Wibowo, 2023)

1. Peradilan dalam rangka pengujian konstitusionalitas Undang-undang
2. Peradilan sengketa konstitusional Lembaga
3. Peradilan perselisihan hasil pemilihan umum
4. Peradilan pembubaran partai politik
5. Peadilan atas pelanggaran presiden atau wakil presiden

Berdasarkan kwewenangan tersebut jelas disini Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang penting dan strategis. Kewenagna yang strategis ini ditambahkan lagi dengan sifat putusannya yang bersifat final, artinya terhadap putusan itu tidak bisa dilakukan banding dengan upaya apapun juga. Salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi adalah menyelesaikan sangketa kewenangan yang terjadi antar lembaga Negara amat tegas dinyatakan bahwa sengketa yang dapat diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap masalah yang terjadi antar lembag Negara hanyalah terhadap sengketa kewenangan saja, dan kewenangan itu adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD.(Kosariza et al., 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan pemahaman masyarakat dengan lebih detail serta mendalami konteks teoretis melalui studi literatur. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara masyarakat menggunakan kuesioner online. Kuesioner disebarakan melalui platform Google Form untuk menjangkau responden dari berbagai latar belakang secara efisien. Tujuan utama metode ini adalah menggali persepsi, pandangan, dan pengalaman masyarakat terkait peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, memungkinkan fleksibilitas dalam eksplorasi isu-isu yang relevan selama proses pengumpulan data. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan data sekunder melalui studi literatur. Kajian ini mencakup telaah teori, konsep, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan mengenai Mahkamah Konstitusi, fungsi-fungsinya, dan persepsi publik terhadap institusi tersebut. Sumber literatur meliputi buku, artikel jurnal, dokumen resmi, serta laporan penelitian. Studi literatur ini berfungsi sebagai dasar dalam memahami konteks teoretis dan menyediakan pembandingan terhadap temuan dari wawancara masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan beberapa responden mengenai persepsi mereka terhadap peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memahami pandangan mahasiswa terkait kinerja dan citra MK, serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap lembaga peradilan tertinggi ini, oleh karena itu analisis difokuskan pada lima tema utama, yaitu: (1) pandangan terhadap peran MK dalam menjaga konstitusi dan demokrasi, (2) tingkat kepercayaan terhadap putusan MK, (3) kemudahan akses informasi tentang MK, (4) pengaruh media massa dan politik terhadap persepsi publik, serta (5) harapan terhadap MK di masa depan. Berikut adalah hasil analisis yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan 10 responden:

Tabel 1. Hasil Wawancara Narasumber: Cindi Nurningsih

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Anda menilai peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia?	Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusi dan Demokrasi Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi dengan mengawasi agar peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan menjadi penengah dalam perselisihan hasil pemilu dan sengketa kewenangan lembaga negara, MK juga berperan menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. MK berfungsi untuk memastikan agar pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah disepakati, sehingga hak-hak konstitusional warga negara terlindungi.
2	Seberapa percaya Anda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi? Jelaskan alasan Anda.	Kepercayaan terhadap MK seringkali tergantung pada transparansi proses peradilan dan konsistensi putusan. Jika MK mampu menghasilkan putusan yang tegas, independen, dan berbasis hukum, masyarakat cenderung lebih percaya. Sebaliknya, jika ada persepsi bahwa putusan dipengaruhi kepentingan politik atau tidak konsisten, kepercayaan masyarakat bisa menurun.
3	Apakah Anda merasa mudah mengakses informasi tentang Mahkamah Konstitusi? Jika ya, dari	Informasi tentang MK umumnya dapat diakses melalui media massa, situs resmi MK, atau media sosial. Meski informasi tersedia, masyarakat masih bisa kesulitan dalam memahami detail teknis putusan. Media massa berperan penting dalam

	mana Anda mendapatkan informasi tersebut? Jika tidak, mengapa?	menyederhanakan berita terkait MK agar lebih mudah dipahami, tetapi seringkali sudut pandangnya dipengaruhi oleh kebijakan editorial.
4	Apakah Anda merasa media massa dan politik memengaruhi persepsi Anda terhadap Mahkamah Konstitusi? Jika ya, bagaimana pengaruhnya?	Media massa dan politik memiliki dampak signifikan terhadap persepsi publik terhadap MK. Pemberitaan yang cenderung bias atau berkaitan dengan konflik politik dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap putusan-putusan MK. Misalnya, berita tentang adanya tekanan politik pada MK dapat menimbulkan keraguan mengenai independensi lembaga ini.
5	Apa harapan Anda terhadap Mahkamah Konstitusi di masa depan? Apa yang menurut Anda perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik terhadap MK?	Harapan publik terhadap MK adalah agar terus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan independensi. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, MK perlu mengupayakan transparansi, konsistensi dalam putusan, dan menghindari konflik kepentingan. MK juga diharapkan lebih aktif menyosialisasikan peran dan proses pengambilan keputusannya, agar masyarakat memahami betul fungsi lembaga ini dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan wawancara dengan Cindi Nurningsih, mahasiswa S1 Pendidikan Fisika UNIMED, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Cindi menilai MK sebagai pengawas peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan UUD 1945 dan menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Cindi percaya bahwa kepercayaan publik terhadap putusan MK bergantung pada transparansi dan independensi. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan bisa berkurang jika ada indikasi ketidakadilan atau pengaruh politik. Meskipun informasi tentang MK mudah diakses melalui situs resmi dan media sosial, masyarakat masih kesulitan memahami detail teknis putusan. Harapannya, MK harus terus menjaga independensi dan transparansi untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik, serta memperkuat perannya sebagai penjaga konstitusi dalam mendukung demokrasi di Indonesia.

Tabel 2. Hasil Wawancara Narasumber: Indi Aulia

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Anda menilai peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia?	Mahkamah Konstitusi menjaga konstitusi dan demokrasi dengan menguji undang-undang agar sesuai UUD 1945, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, dan mengawal hasil pemilu. Peran ini menjadikan MK sebagai "penjaga konstitusi" yang penting dalam demokrasi Indonesia.
2	Seberapa percaya Anda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi? Jelaskan alasan Anda.	Saya percaya pada putusan Mahkamah Konstitusi karena prosesnya terbuka dan independen, dengan pengawasan publik. Namun, kepercayaan bisa berkurang jika ada indikasi ketidakadilan atau pengaruh politik dalam putusan.
3	Apakah Anda merasa mudah mengakses informasi tentang Mahkamah Konstitusi? Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tersebut? Jika tidak, mengapa?	Ya, informasi tentang Mahkamah Konstitusi cukup mudah untuk diakses. Saya bisa mendapatkannya melalui situs resmi MK, berita online, dan media sosial, yang sering memperbarui informasi terkait putusan, sidang, dan kegiatan lainnya.
4	Apakah Anda merasa media massa dan politik memengaruhi persepsi Anda terhadap Mahkamah Konstitusi? Jika ya, bagaimana pengaruhnya?	Ya, media dan politik berpengaruh pada persepsi saya tentang Mahkamah Konstitusi. Pemberitaan isu politik bisa memicu keraguan, jadi penting untuk tetap kritis dan melihat dari berbagai perspektif.
5	Apa harapan Anda terhadap Mahkamah Konstitusi di masa depan? Apa yang menurut Anda perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik terhadap MK?	Harapan saya terhadap Mahkamah Konstitusi di masa depan adalah agar tetap menjaga independensi dan transparansi dalam setiap putusannya, serta semakin memperkuat peranannya sebagai penjaga konstitusi untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik.

Berdasarkan wawancara dengan Indi Aulia, mahasiswa S1 Pendidikan Fisika UNIMED, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia, termasuk menguji undang-undang dan menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Indi menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap putusan MK dipengaruhi oleh transparansi dan konsistensi. Ia percaya bahwa keputusan yang tegas dan independen akan meningkatkan kepercayaan, sementara persepsi adanya pengaruh politik dapat menurunkannya. Akses informasi tentang MK kini lebih mudah melalui situs resmi dan media sosial, meskipun masyarakat masih kesulitan memahami detail teknis putusan. Indi berharap MK terus menjaga independensi dan transparansi untuk memperkuat perannya sebagai penjaga konstitusi dan mendukung demokrasi yang berkelanjutan di Indonesia.

Tabel 3. Hasil Wawancara Narasumber: Marchiana Ivo

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Anda menilai peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia?	(MK) memiliki peran vital dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia dengan memastikan seluruh undang-undang dan kebijakan negara selaras dengan UUD 1945. Melalui kewenangan pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa antar-lembaga negara, pengawasan hasil pemilu, hingga potensi pembubaran partai politik, MK berfungsi sebagai benteng supremasi hukum dan pelindung hak-hak konstitusional rakyat. Namun, efektivitas perannya sangat bergantung pada integritas dan independensi hakim serta kepercayaan publik terhadap transparansi dan keadilan putusan- putusan MK. Dengan menjaga nilai-nilai ini, MK dapat terus menjadi pilar utama dalam menegakkan demokrasi yang sehat dan berkeadilan.
2	Seberapa percaya Anda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi? Jelaskan alasan Anda.	Kepercayaan terhadap putusan (MK) bergantung pada sejauh mana lembaga tersebut menjaga integritas, independensi, dan transparansi dalam menjalankan tugasnya. Secara ideal, MK merupakan garda terakhir dalam menegakkan keadilan dan konstitusi, sehingga publik seharusnya dapat mempercayai setiap putusannya. Namun, kepercayaan ini bisa tergerus ketika terjadi kontroversi, seperti dugaan intervensi politik, konflik kepentingan, atau ketidakkonsistenan dalam putusan. Oleh karena itu, tingkat kepercayaan masyarakat, termasuk saya, terhadap MK akan meningkat apabila lembaga ini konsisten menjaga profesionalisme dan terbuka terhadap pengawasan publik.
3	Apakah Anda merasa mudah mengakses informasi tentang Mahkamah Konstitusi? Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tersebut? Jika tidak, mengapa?	Ya, melalui internet atau media sosial saya dapat lebih mudah mengetahui informasi tentang MK
4	Apakah Anda merasa media massa dan politik memengaruhi persepsi Anda terhadap Mahkamah Konstitusi? Jika ya, bagaimana pengaruhnya?	Ya, media massa dan politik dapat memengaruhi persepsi saya terhadap Mahkamah Konstitusi, terutama dalam kasus-kasus yang menarik perhatian publik. Media massa sering membingkai informasi dengan sudut pandang tertentu yang dapat memengaruhi cara masyarakat memahami putusan MK, baik secara positif maupun negatif.
5	Apa harapan Anda terhadap Mahkamah Konstitusi di masa depan? Apa yang menurut Anda perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik terhadap MK?	Harapan saya terhadap Mahkamah Konstitusi di masa depan adalah agar lembaga ini tetap konsisten menjaga independensi, integritas, dan transparansi dalam setiap putusannya sehingga dapat menjadi penjaga konstitusi yang tepercaya. Untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik, MK perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal, memastikan rekrutmen hakim dilakukan secara ketat dan bebas dari

		kepentingan politik, serta meningkatkan komunikasi publik untuk menjelaskan dasar hukum dari setiap putusan secara jelas. Dengan demikian, MK dapat terus menjadi pilar utama dalam menegakkan keadilan dan menjaga demokrasi di Indonesia.
--	--	---

Berdasarkan wawancara dengan Marchiana Ivo, mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Medan, terungkap bahwa peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia dianggap vital. Marchiana menekankan pentingnya integritas, independensi, dan transparansi dalam menjalankan tugas MK. Ia juga menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap MK sangat bergantung pada keadilan dan transparansi putusan-putusan yang dikeluarkan. Marchiana mengungkapkan bahwa kepercayaan dapat tergerus jika terjadi kontroversi seperti dugaan intervensi politik atau konflik kepentingan. Ia mengharapkan MK di masa depan tetap konsisten menjaga independensi, integritas, dan transparansi serta memperkuat mekanisme pengawasan internal, melakukan rekrutmen hakim secara ketat dan bebas dari kepentingan politik, serta meningkatkan komunikasi publik untuk menjelaskan dasar hukum dari setiap putusan.

Tabel 4. Hasil Wawancara Narasumber: Rizki Aulia

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Anda menilai peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia?	Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia sangat penting. MK memiliki kewenangan yang luas untuk mengadili sengketa terkait konstitusi, dan putusan MK bersifat final dan mengikat. Namun, MK juga menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan tugasnya. Penting untuk terus meningkatkan moralitas, etik, dan penegakan hukum di Indonesia untuk mendukung demokrasi yang kuat dan berkelanjutan.
2.	Seberapa percaya Anda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi? Jelaskan alasan Anda.	Terlepas dari berbagai pandangan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia. MK memiliki kewenangan untuk menguji materiil undang-undang, menyelesaikan sengketa Pemilu, dan mengadili sengketa terkait hak-hak politik warga negara. Penting untuk diingat bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, termasuk MK, sangat penting untuk menjaga stabilitas dan legitimasi hukum di Indonesia.
3.	Apakah Anda merasa mudah mengakses informasi tentang Mahkamah Konstitusi? Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tersebut? Jika tidak, mengapa?	Mengakses informasi tentang Mahkamah Konstitusi di era sekarang sangat mudah. karena informasi yang kita dapat bisa melalui website resmi Mahkamah konstitusi, media online, Jurnal ilmiah dan publikasi akademis
4.	Apakah Anda merasa media massa dan politik memengaruhi persepsi Anda terhadap Mahkamah Konstitusi? Jika ya, bagaimana pengaruhnya?	Penting untuk diingat bahwa media massa dan politik dapat memengaruhi persepsi publik terhadap berbagai lembaga, termasuk Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penting untuk mengonsumsi informasi dari berbagai sumber dan menganalisisnya secara kritis untuk membentuk opini yang objektif. pengaruh dari media massa dan politik itu seperti :media massa seringkali menyoroti putusan-putusan MK yang kontroversial atau yang memiliki implikasi politik. Hal ini dapat menyebabkan persepsi publik yang negatif terhadap MK, terutama jika media massa menyajikan informasi secara bias atau tidak akurat.

5.	Apa harapan Anda terhadap Mahkamah Konstitusi di masa depan? Apa yang menurut Anda perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik terhadap MK?	Harapan saya terhadap Mahkamah Konstitusi di masa depan adalah agar lembaga ini semakin kuat dan independen dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia. MK harus terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dan membangun kepercayaan publik yang lebih tinggi. beberapa hal yang menurut saya perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik seperti: 1.Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas 2.Meningkatkan Kualitas Hakim Konstitusi 3.Dan meningkatkan Kinerja dan Efektivitas MK.
----	---	---

Berdasarkan wawancara dengan Rizka Aulia, mahasiswa Psikologi Universitas Deztron Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia, terutama dalam mengadili sengketa konstitusi, menguji undang-undang, dan menyelesaikan perselisihan pemilu. Meskipun putusannya bersifat final dan mengikat, MK menghadapi tantangan terkait moralitas, etika, dan penegakan hukum. Rizka menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap MK, yang dapat ditingkatkan melalui transparansi, akuntabilitas, kualitas hakim, dan efektivitas kinerja lembaga tersebut. Akses informasi tentang MK kini lebih mudah berkat teknologi, namun masyarakat perlu mengkritisi informasi yang diterima, mengingat pengaruh media dan politik terhadap persepsi publik. Rizka berharap MK di masa depan semakin kuat, independen, dan mampu membangun kepercayaan publik yang lebih tinggi, mendukung demokrasi yang berkelanjutan.

Tabel 5. Hasil Wawancara Narasumber: Vettris Dwarti Sinaga

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Anda menilai peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia?	MK berperan dalam memastikan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara teratur, bebas, dan adil. Ini termasuk melindungi hak pilih warga negara dan menjamin persamaan hak bagi semua warga negara untuk dipilih. Dengan demikian, MK berkontribusi pada stabilitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses politik.
2.	Seberapa percaya Anda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi? Jelaskan alasan Anda.	70 persen jika Proses yang transparan dalam pengambilan keputusan MK, termasuk akses informasi dan partisipasi publik, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat merasa terlibat dan memahami proses, mereka lebih cenderung mempercayai hasilnya.
3.	Apakah Anda merasa mudah mengakses informasi tentang Mahkamah Konstitusi? Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tersebut? Jika tidak, mengapa?	Ya, karna Banyak artikel yang membahas perbedaan antara MK dan lembaga peradilan lainnya, serta menjelaskan kedudukan dan fungsi MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Misalnya, artikel yang menjelaskan tentang kewenangan MK dan bagaimana MK berperan dalam menjaga konstitusi
4.	Apakah Anda merasa media massa dan politik memengaruhi persepsi Anda terhadap Mahkamah Konstitusi? Jika ya, bagaimana pengaruhnya?	Ya, Karena Media massa berperan penting dalam menyampaikan informasi tentang putusan-putusan MK, proses hukum yang dijalankan, dan isu-isu konstitusi yang sedang hangat dibicarakan. Berita yang disajikan dapat memengaruhi bagaimana masyarakat memandang keputusan MK, apakah positif atau negatif.
5.	Apa harapan Anda terhadap Mahkamah Konstitusi di masa depan? Apa yang menurut Anda perlu dilakukan untuk	Harapan saya terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) di masa depan adalah agar lembaga ini dapat terus berfungsi sebagai pengawal konstitusi yang efektif dan independen. penting bagi MK untuk menjaga integritas

meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik terhadap MK?	dan kredibilitasnya di mata publik, terutama di tengah tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga negara lainnya.
--	---

Berdasarkan wawancara dengan Vettris Dwarti Sinaga, mahasiswa PGSD Universitas Negeri Medan, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran krusial dalam menjaga demokrasi di Indonesia, terutama dalam memastikan pemilu yang teratur, bebas, dan adil. MK juga berperan penting dalam melindungi hak pilih dan kesetaraan hak warga negara, yang mendukung stabilitas demokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses politik. Vettris menekankan bahwa transparansi dan keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan MK sangat penting untuk membangun kepercayaan, dengan sekitar 70 persen kepercayaan masyarakat bergantung pada proses tersebut. Ia juga mencatat bahwa pemahaman masyarakat mengenai peran MK perlu ditingkatkan, dan media massa memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi publik terhadap MK. Media yang bias atau tidak akurat dapat berdampak negatif, meskipun media juga berfungsi sebagai alat edukasi publik. Vettris berharap agar MK tetap independen, kredibel, dan efektif dalam menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi di masa depan.

Tabel 6. Hasil Wawancara Narasumber: Raisa Ann Michelle

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Anda menilai peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia?	Secara keseluruhan, peran MK dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia sangatlah positif. MK telah berhasil menjadi benteng terakhir bagi perlindungan konstitusi dan menjadi penjaga demokrasi. Namun demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh MK ke depannya.
2.	Seberapa percaya Anda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi? Jelaskan alasan Anda.	Sangat percaya karna Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang memiliki peran krusial dalam menjaga konstitusi dan menegakkan demokrasi di Indonesia.
3.	Apakah Anda merasa mudah mengakses informasi tentang Mahkamah Konstitusi? Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tersebut? Jika tidak, mengapa?	Mudah, Internet: Saya dapat mencari informasi secara real-time dari internet, termasuk situs web resmi Mahkamah Konstitusi, berita online, jurnal ilmiah, dan berbagai platform media sosial.
4.	Apakah Anda merasa media massa dan politik memengaruhi persepsi Anda terhadap Mahkamah Konstitusi? Jika ya, bagaimana pengaruhnya?	Iya mempengaruhi karna Pembentukan Respons: Informasi yang saya proses akan membantu saya dalam membentuk respons yang relevan dan informatif ketika Anda mengajukan pertanyaan tentang Mahkamah Konstitusi. Misalnya, jika Anda bertanya tentang kontroversi terkait putusan tertentu, saya dapat memberikan informasi yang objektif dari berbagai sumber.
5.	Apa harapan Anda terhadap Mahkamah Konstitusi di masa depan? Apa yang menurut Anda perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik terhadap MK?	Peningkatan Transparansi: Proses peradilan di MK perlu terus ditingkatkan transparansinya. Masyarakat perlu diberikan akses yang lebih mudah terhadap informasi mengenai perkara yang sedang ditangani, alasan di balik putusan, dan berbagai dokumen terkait

Berdasarkan wawancara dengan Raisa Ann Michelle, mahasiswa semester 3, jurusan Fisika, Universitas Negeri Medan, ia memandang Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran positif dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Raisa percaya bahwa MK berhasil menjalankan fungsinya meskipun menghadapi tantangan dari dinamika politik dan sosial. Ia sangat percaya pada keputusan MK, menganggapnya sebagai lembaga independen dan

kredibel. Akses informasi tentang MK dianggap mudah berkat teknologi, meskipun ada kesenjangan di daerah dengan akses terbatas. Raisa menyadari bahwa media massa dan politik dapat memengaruhi persepsi publik terhadap MK dan menekankan pentingnya pemberitaan yang berimbang. Sebagai harapan, Raisa ingin MK meningkatkan transparansi, termasuk mempermudah akses informasi dan menjelaskan alasan putusan, guna memperkuat kepercayaan masyarakat.

Tabel 7. Hasil Wawancara Narasumber: Stefany Margaretha Br Napitupulu

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Anda menilai peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia?	Menurut saya Mahkamah Konstitusi termasuk lembaga yang sangat penting karena memastikan undang-undang yang dibuat sesuai dengan aturan dasar negara (konstitusi) dan menjaga jalannya demokrasi.
2.	Seberapa percaya Anda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi? Jelaskan alasan Anda.	Saya cukup percaya dengan putusan MK karena MK adalah lembaga independen. Tapi mungkin sedikit ada keraguan, terutama jika putusan dianggap tidak adil atau terkait dengan kepentingan politik tertentu.
3.	Apakah Anda merasa mudah mengakses informasi tentang Mahkamah Konstitusi? Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tersebut? Jika tidak, mengapa?	Ya, saya merasa mudah mengakses informasi tentang MK, biasanya dari situs resmi MK, berita di media online, dan media sosial yang sering menyampaikan informasi terbaru tentang MK.
4.	Apakah Anda merasa media massa dan politik memengaruhi persepsi Anda terhadap Mahkamah Konstitusi? Jika ya, bagaimana pengaruhnya?	Ya, media dan politik berpengaruh pada pandangan saya. Berita atau pendapat dari tokoh politik kadang membentuk opini saya, baik positif atau negatif, tentang keputusan yang dibuat MK.
5.	Apa harapan Anda terhadap Mahkamah Konstitusi di masa depan? Apa yang menurut Anda perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik terhadap MK?	Saya harap MK bisa terus menjalankan tugas dengan independen dan transparan. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, MK perlu menjaga integritas dan memperjelas alasan di balik setiap keputusan yang diambil agar lebih mudah dipahami.

Berdasarkan wawancara dengan Stefany Margaretha br Napitupulu, mahasiswa Agribisnis Universitas Darma Agung, memandang Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga penting dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Ia percaya MK memastikan undang-undang tetap sesuai dengan dasar negara. Meskipun ia percaya MK independen, Stefany mengakui adanya keraguan terhadap putusan yang dianggap tidak adil atau dipengaruhi kepentingan politik. Stefany merasa mudah mengakses informasi tentang MK melalui situs resmi, berita online, dan media sosial. Ia juga menyadari pengaruh media dan politik dalam membentuk persepsi publik terhadap MK, dan menekankan pentingnya pemberitaan yang objektif. Stefany berharap MK tetap independen, transparan, dan menjaga integritasnya untuk memperkuat kepercayaan publik.

Tabel 8. Hasil Wawancara Narasumber: Abel Three Ivanka

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Anda menilai peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia?	Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Keberadaan dan kinerjanya memberikan mekanisme perlindungan terhadap hak-hak konstitusional rakyat serta memastikan bahwa semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, tunduk pada supremasi konstitusi. Namun, penting juga bagi MK untuk menjaga integritas dan independensinya dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, agar kepercayaan publik terhadap lembaga ini

		tetap terjaga dan perannya sebagai pilar demokrasi dapat terus efektif.
2.	Seberapa percaya Anda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi? Jelaskan alasan Anda.	Secara umum, saya percaya pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena perannya sebagai lembaga independen yang memiliki mandat konstitusional untuk menjaga keadilan dan demokrasi. Putusan MK sering kali didasarkan pada pertimbangan hukum dan prinsip-prinsip konstitusi yang mendalam. Namun, kepercayaan ini bisa terganggu ketika ada isu-isu terkait integritas internal atau tekanan politik yang mempengaruhi independensi MK. Konsistensi, transparansi, dan profesionalisme MK sangat menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap putusannya.
3.	Apakah Anda merasa mudah mengakses informasi tentang Mahkamah Konstitusi? Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tersebut? Jika tidak, mengapa?	Ya, informasi tentang Mahkamah Konstitusi cukup mudah diakses melalui situs resmi MK, berita media online, dan publikasi putusan yang tersedia secara terbuka. Media sosial dan kanal berita hukum juga sering memberikan update tentang keputusan-keputusan penting MK. Namun, meski informasinya tersedia, memahami detail hukum dalam putusan bisa menantang bagi masyarakat umum karena bahasa hukum yang kompleks.
4.	Apakah Anda merasa media massa dan politik memengaruhi persepsi Anda terhadap Mahkamah Konstitusi? Jika ya, bagaimana pengaruhnya?	Ya, media massa dan politik memengaruhi persepsi saya terhadap Mahkamah Konstitusi. Pemberitaan media sering kali menyoroti kasus-kasus kontroversial atau isu integritas di MK, yang dapat memperkuat kesan negatif atau meragukan independensi MK. Liputan politik juga kadang berpotensi membentuk opini publik, terutama jika ada dugaan intervensi politik terhadap putusan MK. Akibatnya, persepsi publik bisa terpengaruh oleh cara media dan politik mengemas informasi terkait MK.
5.	Apa harapan Anda terhadap Mahkamah Konstitusi di masa depan? Apa yang menurut Anda perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik terhadap MK?	Saya berharap Mahkamah Konstitusi tetap independen, transparan, dan konsisten dalam menegakkan konstitusi. Untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik, MK perlu menjaga integritas internalnya, menghindari pengaruh politik, serta menyederhanakan bahasa hukum dalam putusan agar lebih mudah dipahami masyarakat. Peningkatan transparansi dalam setiap proses dan edukasi hukum kepada publik juga penting untuk memperkuat peran MK sebagai penjaga demokrasi.

Wawancara dengan Abel Three Ivanka menunjukkan bahwa ia memiliki pandangan positif terhadap peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Abel menekankan pentingnya integritas dan independensi MK dalam menjalankan tugasnya, serta mengharapkan MK tetap konsisten dalam menegakkan konstitusi. Ia menilai bahwa kepercayaan publik terhadap MK sangat bergantung pada transparansi dan konsistensi dalam mengeluarkan putusan. Abel mengungkapkan bahwa media massa dan politik dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap MK, terutama dalam kasus-kasus kontroversial. Ia menyarankan MK untuk menjaga integritas internal, menghindari pengaruh politik, menyederhanakan bahasa hukum dalam putusan, dan meningkatkan transparansi dalam setiap proses untuk memperkuat peran MK sebagai penjaga demokrasi.

Tabel 9. Hasil Wawancara Narasumber: Dian Florensyah

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Anda menilai peran Mahkamah Konstitusi dalam	Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran penting dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Sebagai

	menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia?	lembaga konstitusi tertinggi, MK memiliki wewenang untuk menafsirkan dan memutuskan sengketa yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam hal ini, MK berperan sebagai penjaga konstitusi dan memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945 . MK juga berperan dalam menjaga demokrasi di Indonesia. MK memiliki wewenang untuk mengadili presiden dan wakil presiden dalam hal pelanggaran konstitusi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pejabat negara bertanggung jawab dan tidak melanggar konstitusi.
2.	Seberapa percaya Anda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi? Jelaskan alasan Anda.	menurut saya, Putusan MK merupakan keputusan yang memiliki kekuasaan dan otoritas yang tinggi dalam menafsirkan dan memutuskan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi. MK memiliki wewenang untuk mengubah, membatalkan, atau memperkuat undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945. Oleh karena itu, putusan MK dianggap memiliki kekuasaan yang besar dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.
3.	Apakah Anda merasa mudah mengakses informasi tentang Mahkamah Konstitusi? Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tersebut? Jika tidak, mengapa?	Yaa, Saya dapat mengakses informasi tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel berita, dan situs web resmi MK.
4.	Apakah Anda merasa media massa dan politik memengaruhi persepsi Anda terhadap Mahkamah Konstitusi? Jika ya, bagaimana pengaruhnya?	yaa, media massa dan politik dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap MK dengan berbagai cara. Namun, penting untuk diingat bahwa MK juga memiliki wewenang dan otoritas yang tinggi dalam menafsirkan dan memutuskan sengketa konstitusi, sehingga persepsi masyarakat terhadap MK harus diimbangi dengan pengetahuan dan informasi yang akurat dan terbaru..
5.	Apa harapan Anda terhadap Mahkamah Konstitusi di masa depan? Apa yang menurut Anda perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik terhadap MK?	Upaya untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik terhadap MK di masa depan dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kualitas dan keahlian hakim konstitusi, serta komunikasi dan dialog antara MK dan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Dian Florensyah, mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika Semester 3 Universitas Negeri Medan, diperoleh beberapa pandangan tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Dian menegaskan bahwa MK memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia, termasuk menafsirkan UUD 1945, memutuskan sengketa terkait undang-undang, dan memastikan pejabat negara mematuhi konstitusi. Ia juga mengakui bahwa putusan MK memiliki kekuatan dan otoritas tinggi dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dian menyatakan bahwa akses informasi mengenai MK tersedia luas melalui buku, jurnal, artikel berita, dan situs resmi MK. Namun, ia juga mengakui bahwa media massa dan politik dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap MK, sehingga penting untuk mengimbangnya dengan informasi yang akurat dan terpercaya. Harapan Dian terhadap MK adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas hakim konstitusi. Ia juga menyarankan perlunya komunikasi yang lebih baik antara MK dan masyarakat untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga ini di masa depan.

Tabel 10. Hasil Wawancara Narasumber: Sophie Hikmatul Fadhila

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Anda menilai peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia?	Cukup
2.	Seberapa percaya Anda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi? Jelaskan alasan Anda.	Cukup percaya
3.	Apakah Anda merasa mudah mengakses informasi tentang Mahkamah Konstitusi? Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tersebut? Jika tidak, mengapa?	Tidak. Mungkin karena jarang mencari tahu
4.	Apakah Anda merasa media massa dan politik memengaruhi persepsi Anda terhadap Mahkamah Konstitusi? Jika ya, bagaimana pengaruhnya?	Ya, sangat berpengaruh terhadap pandangan saya mengenai Mahkamah Konstitusi
5.	Apa harapan Anda terhadap Mahkamah Konstitusi di masa depan? Apa yang menurut Anda perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik terhadap MK?	Semoga Mahkamah Konstitusi tetap menjadi pilar utama dalam menjaga konstitusi dan hak-hak warga negara serta transparansi dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan wawancara dengan Sophie Hikmatul Fadhila, mahasiswa Polstat STIS D-3 diketahui bahwa ia memiliki tingkat kepercayaan yang cukup terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) meskipun jarang mencari informasi mendalam tentang lembaga tersebut. Ia menyadari bahwa media massa memiliki pengaruh besar terhadap pandangannya tentang MK, sehingga penting untuk mengedukasi masyarakat agar mendapatkan informasi yang lebih objektif. Sophie berharap MK tetap menjadi pilar utama dalam menjaga konstitusi, hak-hak warga negara, dan transparansi dalam pengambilan keputusan, mencerminkan harapan generasi muda terhadap integritas lembaga tersebut. Dari kesepuluh responden sepakat bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Mereka menilai MK sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Responden percaya bahwa kepercayaan publik terhadap MK bergantung pada transparansi, independensi, dan konsistensi dalam putusan. Mereka juga menyadari bahwa media massa dan politik memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi publik terhadap MK. Responden berharap MK di masa depan tetap menjaga independensi, integritas, dan transparansi dalam setiap putusannya. Mereka juga menyarankan MK untuk meningkatkan komunikasi publik, memperjelas dasar hukum dari setiap putusan, dan menghindari konflik kepentingan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Secara keseluruhan, responden memiliki harapan tinggi terhadap MK sebagai lembaga yang dapat terus menjaga konstitusi dan mendukung demokrasi yang berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang signifikan dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Mayoritas mahasiswa memandang MK sebagai institusi yang penting dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, persepsi terhadap independensi dan transparansi lembaga ini masih menjadi tantangan, terutama dalam konteks kontroversi politik dan pemberitaan media massa. Untuk itu, transparansi dalam proses peradilan, konsistensi dalam putusan, dan peningkatan komunikasi dengan masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap MK.

Saran

Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses peradilannya, termasuk memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi terkait putusan dan dasar hukumnya. Selain itu, MK perlu memperkuat komunikasi publik melalui sosialisasi yang lebih intensif, dengan menyederhanakan bahasa hukum agar masyarakat dapat memahami peran dan fungsinya dengan lebih baik. Upaya menjaga independensi juga harus terus dilakukan dengan memperketat standar etika dan rekrutmen hakim, sehingga lembaga ini tetap bebas dari pengaruh politik atau konflik kepentingan. MK juga dapat memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai sarana edukasi publik untuk membangun kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya peran lembaga ini dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat legitimasi MK di mata publik dan meningkatkan kontribusinya dalam mendukung tatanan negara hukum yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Chakim, M. L. (2016). Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 328. <https://doi.org/10.31078/jk1227>
- Kosariza, K., Netty, N., & Yarni, M. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 547–556. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11001>
- Masrufah, & Wibowo, A. (2023). Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 108–112. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.108>
- Putri, W. A. (2022). Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Republik Indonesia. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(Uud 1945), 671–680.
- Saputra, R. E., Pandiangan, T. R., Pifua, A. S., & Okhir, A. S. (2024). Pengaruh Putusan MK NOMOR 1/PUU-XXI/2023 Terhadap Sikap Politik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 198–208. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1633>
- Soeroso, F. L. (2013). “Pembangkangan” Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT). *Jurnal Yudisial*, 6(3), 227–249.
- Umar, K., & Sofyan. (2023). Dinamika Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Al Tasyri’iyyah*, 3(1), 1–13.
- Yuliana, A., Tuasalamony, A. A., Fath, A., Parhusip, A. D., Febriani, A., & Bakhtiar, H. S. (2024). Analisis Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Hukum Statuta*, 3(2), 74–91.